



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JOKO SANTOSO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **637135**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>830.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/68 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/68 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/40 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>386.500.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.850.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>24.441.362</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.244.791.362
III. HUTANG	Rp.	148.163.969
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.096.627.393

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.